



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2026 dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). RTP bertujuan sebagai bentuk penguatan SPIP dan acuan bagi kegiatan pengendalian risiko.

Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dengan disusunnya RTP Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2026 diharapkan dapat menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian dan penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan dokumen RTP ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkret bagi upaya pencapaian tujuan Bappeda Kota Banda Aceh. Terima Kasih.

Banda Aceh, Januari 2026
Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


M. NURDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196804201990111001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan suatu organisasi diukur melalui kesuksesannya didalam merealisasikan seluruh target baik dari sisi kinerja maupun efektivitas pengelolaan anggaran. Bagi instansi pemerintahan, pengelolaan tersebut diatur dalam suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan amanah dari berbagai peraturan yaitu UU Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara serta UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengendalian intern membutuhkan suatu rencana tindak yang dapat mengantisipasi segala risiko dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang menggambarkan efektivitas suatu organisasi dalam mengendalikan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintahan. RTP merupakan bagian dari SPIP dan bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi demi menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), oleh sebab itu setiap organisasi pemerintahan diwajibkan melakukan pengendalian intern yang didukung oleh rencana tindak di dalam mengendalikan capaian seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Bappeda Kota Banda Aceh, selaku instansi penyelenggara kegiatan perencanaan pembangunan, memiliki kewajiban untuk mengontrol dan mengantisipasi seluruh ancaman risiko dalam setiap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Untuk itu perlu disusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Kota Banda Aceh sehingga seluruh target organisasi dapat tercapai dan pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Banda Aceh juga dapat terealisasi sesuai rencana.

1.2. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh; dan
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Resiko Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

1.3. TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Kota Banda Aceh bertujuan sebagai penguatan SPIP dan acuan bagi pimpinan dan seluruh aparatur Bappeda Kota Banda Aceh di dalam mengendalikan risiko pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2026.

1.4. MANFAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan kegiatan pengendalian dan pelaksanaan tugas pokok Bappeda Kota Banda Aceh;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi bahan dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Mengukur pencapaian Tujuan dan Sasaran Bappeda secara efisien dan efektif;
5. Menjadi bahan pengendalian sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat diselenggarakan secara handal; dan
6. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

1.5. RUANG LINGKUP

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Banda Aceh. Aktivitas pengendalian mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, rencana tindak pengendalian, komunikasi pengendalian, serta metode pemantauan atas pengendalian. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, dan seluruh pegawai di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. PENGERTIAN SPIP

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut SPI sendiri didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kemudian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-282 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Pengendalian Intern dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (*never ending process*) oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

2.2. TUJUAN SPIP

PP Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. Untuk itu demi mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan walikota/bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. UNSUR-UNSUR DALAM SPIP

Dalam pelaksanaannya, pengendalian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kemudian diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP. Berikut adalah unsur-unsur dalam SPIP seperti yang dijabarkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

1. *Lingkungan Pengendalian*

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- penegakan integritas dan nilai etika;
- komitmen terhadap kompetensi;
- kepemimpinan yang kondusif;
- pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. *Penilaian Risiko*

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko, baik risiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi maupun risiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau pengendalaian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok/tupoksi dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait dengan proses penilaian risiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para stakeholders.

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan berupa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh pihak eksternal.

BAB III
PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

3.1. PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN BAPPEDA
TAHUN 2026

Dalam rangka melakukan proses pengendalian, dibutuhkan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pengendalian. Lingkungan pengendalian intern dinilai dengan menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE) yang mencakup 8 (delapan) klasifikasi penilaian, yaitu: Penegakan integritas dan nilai etika; Komitmen terhadap kompetensi; Kepemimpinan yang kondusif; Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat; Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Kedelapan klasifikasi tersebut diurai kedalam beberapa pertanyaan/kuisisioner dan dinilai oleh 6 (enam) orang responden yang diwakili oleh pejabat struktural pada lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.

Skala penilaian dan simpulan jawaban dalam kuisisioner penilaian lingkungan pengendalian, ditentukan sebagai berikut:

Tabel. 3.1.1. Skor dan Simpulan Jawaban Terhadap Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian

Skor	Keterangan Jawaban	Simpulan Jawaban
1	Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun	Kurang Memadai
2	Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten	
3	Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan	Memadai
4	Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain	

Dari hasil penilaian kuisisioner, teridentifikasi 1 (satu) kelemahan/kerentanan pada Bappeda Kota Banda Aceh ditahun 2026. Kerentanan tersebut masuk klasifikasi penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Kelemahan tersebut memiliki nilai modus 2 dan masuk dalam simpulan jawaban KURANG MEMADAI. Kelemahan atau kerentanan

lingkungan pengendalian pada Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2026 tersebut menjadi perhatian organisasi untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut lainnya agar proses pengendalian intern dapat terlaksana dengan maksimal.

Sedangkan 7 (tujuh) klasifikasi/sub unsur lainnya yaitu klasifikasi penegakan integritas dan nilai etika, klasifikasi komitmen terhadap kompetensi, klasifikasi kepemimpinan yang kondusif, klasifikasi pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan, klasifikasi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, klasifikasi perwujudan peran APIP yang efektif, serta klasifikasi hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, teridentifikasi MEMADAI. Secara detail, simpulan hasil penilaian tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.1.2. berikut ini:

Tabel.3.1.2. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
 Tahun Penilaian : 2026

No	Sub unsur/Klasifikasi	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	-	-	Memadai	-	Memadai	-
2	Komitmen terhadap kompetensi	-	-	Memadai	-	Memadai	-
3	Kepemimpinan yang kondusif	-	-	Memadai	-	Memadai	-
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	-	-	Kurang Memadai	Tidak adanya anggaran untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Tidak adanya anggaran untuk pengembangan SDM
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	-	-	Memadai	-	Memadai	-
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai	-	Memadai	-

3.2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam rangka melakukan proses pengendalian, dibutuhkan identifikasi atas berbagai ancaman atau risiko yang mengancam keberhasilan/kelancaran pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan termasuk diantaranya risiko yang mengancam keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi. Dengan teridentifikasinya seluruh risiko, maka antisipasi pengendalian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Identifikasi risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh dilakukan berjenjang mulai dari risiko strategis Bappeda yang mendukung pencapaian IKU Pemerintah Kota Banda Aceh, risiko strategis yang diturunkan dari IKU Pencapaian Tujuan dan sasaran strategis Bappeda sendiri, maupun risiko operasional pada organisasi Bappeda Kota Banda Aceh. Setiap level risiko tersebut diuraikan baik dari segi penyebab terjadinya risiko hingga dampak yang diakibatkan.

Tujuan dan Sasaran Bappeda, sesuai pohon kinerja dan cascading RPJMD Kota Banda Aceh 2025-2029, mengacu pada tujuan kedua RPJMD yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Transparan dan Akuntabel” yang selanjutnya diturunkan pada sasaran RPJMD, “Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsive”. Selain itu permusan tujuan dan sasaran, serta dan arah kebijakan Renstra Bappeda juga menggambarkan upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang tergambar pada pemetaan masalah pada Bappeda Kota Banda Aceh.

Tabel. 3.2.1. Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Penilaian : 2026
Periode yang dinilai : RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel
Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis Pemda: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel									
1.1	Sasaran Strategis Pemda: Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	Predikat SAKIP	Rendahnya predikat SAKIP	RSP - 01	Walikota	Perencanaan kinerja tidak selaras Indikator tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)	Internal/eksternal	C	Menurunnya kepercayaan publik Citra instansi buruk di mata pemerintah pusat/daerah	Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						Pengukuran dan pelaporan kinerja lemah Monitoring dan evaluasi (Monev) tidak berjalan efektif			Evaluasi reformasi birokrasi ikut terdampak Potensi pengurangan alokasi anggaran/kinerja tidak optimal Kinerja organisasi tidak efektif dan tidak efisien Tidak tercapainya sasaran strategis instansi	

Tabel. 3.2.2. Identifikasi Risiko Strategis Bappeda Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Tahun Penilaian : 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis OPD Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Dearah Serta Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Perencanaan Daerah									
1.1	Sasaran Strategis OPD - Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif,	Predikat SAKIP	Rendahnya predikat SAKIP	RSO-1	Kepala Bappeda	Perencanaan kinerja tidak selaras Indikator tidak SMART	Internal/eksternal	C	Menurunnya kepercayaan publik Citra instansi buruk di mata pemerintah pusat/daerah	Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	partisipatif dan interaktif - Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah					(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) Pengukuran dan pelaporan kinerja lemah Monitoring dan evaluasi (Monev) tidak berjalan efektif			Evaluasi reformasi birokrasi ikut terdampak Potensi pengurangan alokasi anggaran/kinerja tidak optimal Kinerja organisasi tidak efektif dan tidak efisien Tidak tercapainya sasaran strategis instansi	
		Indeks Inovasi Daerah	Rendahnya Indeks Inovasi Daerah (IID)	RSO-2	Kepala Bappeda	Keterbatasan anggaran riset dan inovasi SDM aparatur kurang kompeten, Kurangnya kolaborasi dengan	Internal/eksternal	C	Kualitas pelayanan publik tidak berkembang Daya saing daerah menurun Peluang investasi berkurang Kepercayaan	Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, Pelaporan inovasi tidak terdokumentasi dengan baik			masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun	
		SAKIP Komponen Perencanaan	Rendahnya nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	RSO-3	Kepala Bappeda	Kurangnya pemahaman penyusunan SAKIP berbasis hasil (result oriented). Tidak dilakukan revidi berkala terhadap dokumen perencanaan. Minimnya koordinasi antar bidang/unit kerja.	Internal/ eksternal	C	Nilai evaluasi SAKIP rendah dari KemenPAN-RB/Inspektorat. Turunnya kepercayaan publik terhadap instansi. Perencanaan anggaran tidak efektif dan tidak efisien. Program tidak tepat sasaran.	Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Rendahnya kualitas dan efektivitas kebijakan publik	RSO-4	Kepala Bappeda	Data dukung perencanaan tidak valid atau tidak mutakhir. Perubahan regulasi tidak segera diikuti penyesuaian dokumen. Data tidak valid dan tidak terintegrasi Kapasitas analisis kebijakan belum memadai Tidak adanya SOP penyusunan kebijakan berbasis bukti Keterbatasan anggaran kajian	Internal/ eksternal	C	Potensi pengurangan insentif kinerja/DAK/Reward reformasi birokrasi. Sulit mengukur capaian kinerja organisasi secara akurat Kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran Inefisiensi anggaran Menurunnya kepercayaan publik	Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat

Tabel. 3.2.3. Identifikasi Risiko Operasional Bappeda Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Tahun Penilaian : 2026

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Target Kinerja	Uraian Risiko				Sebab		C / U C	Dampak	
				Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c			d	e	f	g	h	i	j	k
1	Pengembangan inovasi dan Teknologi											
1.1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Perencanaan	Risiko kesalahan dalam perumusan tujuan, metodologi, atau pemilihan topik.	RSOO .18.01	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Kurangnya studi literatur, keterbatasan sumber daya manusia, atau asumsi yang tidak valid.	Internal/ Eksternal	C	Penelitian tidak fokus, pemborosan waktu dan biaya.	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda/ Masyarakat
				Pelaksanaan/ pengembangan	Risiko kegagalan eksperimen, keterlambatan jadwal, atau kualitas	RSOO .18.02	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Risiko kegagalan eksperimen, keterlambatan jadwal, atau kualitas				

					data yang rendah.			data yang rendah.	Internal/ Eksternal	C	Hasil penelitian tidak valid, keterlambatan output, reputasi peneliti menurun.	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda/ Masyarakat
				Implementasi teknologi	Risiko ketidak sesuaian prototipe dengan kebutuhan pengguna, masalah teknis, atau biaya produksi tinggi.	RSOO .18.03	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Desain tidak matang, minim uji coba, atau keterbatasan dana.	Internal/ Eksternal	C	Produk gagal diproduksi, tidak layak digunakan, atau tidak efisien.	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda/ Masyarakat
				Diseminasi dan komersialisasi hasil inovasi	Risiko penolakan pasar, regulasi yang tidak mendukung, atau kurangnya mitra industri.	RSOO .18.04	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Kurangnya strategi pemasaran, regulasi ketat, atau rendahnya minat investor.	Internal/ Eksternal	C	Inovasi tidak diterima pasar, kerugian finansial, hilangnya peluang kerja sama.	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda/ Masyarakat

3.3. ANALISIS RISIKO

Analisis risiko dinilai dari sisi kemungkinan terjadi dan dampak yang dihasilkan oleh suatu risiko. Seluruh risiko yang teridentifikasi tersebut, dilakukan analisis untuk melihat skala kemungkinan dan dampak yang dihasilkan. Penilaian skala kemungkinan diberikan dengan metode penilaian 1 sampai dengan 5. Semakin besar skala kemungkinan, maka semakin besar pula kemungkinan suatu risiko terjadi. Berikut adalah tabel penilaian skala kemungkinan menurut nilai.

Analisis dampak dilakukan untuk menilai skala dampak suatu risiko. Semakin besar nilai risiko maka semakin besar pula dampak yang dihasilkan oleh risiko tersebut. Seperti halnya skala kemungkinan, skala dampak juga diukur melalui nilai 1 hingga 5.

Tabel 3.3.1. Kriteria Resiko

A. Peta

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	1..16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

B. Level Risiko

Level Risiko	Besaran risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau

Proses penilaian dan analisis risiko yang dilakukan pada Bappeda Kota Banda Aceh dilakukan dengan melibatkan pejabat struktural sebagai responden melalui metode Focus Group Discussion (FGD). Setiap responden memberikan pendapat dan penilaian terhadap seluruh risiko yang telah diidentifikasi. Masing-masing risiko dinilai skala dampak dan kemungkinan yang telah dinilai oleh responden kemudian dirata-ratakan dan menjadi nilai skala dampak/kemungkinan suatu risiko. Nilai rata-rata penilaian skala kemungkinan dan skala dampak masing-masing risiko tersebut kemudian dikalikan menjadi nilai skala risiko. Dari hasil perkalian akan di dapat risiko dengan nilai tertinggi yang kemudian akan diangkat menjadi risiko prioritas Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2026.

Secara detail, seluruh uraian hasil analisis risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh sesuai hasil penilaian responden, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 3.3.2. Hasil Analisis Risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2026

No.	Risiko	No Reg	R1		R2		R3		R4		R5		Hasil Rata Rata		Analisis Risiko (Pembulatan)		Skala Risiko
			D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	
I	Risiko Strategis Pemko																
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSP - 01	2	5	2	4	2	4	3	5	2	5	2,2	4,6	2	5	15
II	Risiko Strategis OPD																
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSO-1	2	5	3	5	2	5	2	5	2	4	2,2	4,8	2	5	15
2	Rendahnya Indeks Inovasi Daerah (IID)	RSO-2	5	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3,8	3,6	4	4	19
3	Rendahnya nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	RSO-3	3	2	4	2	4	2	4	3	4	3	3,8	2,4	4	2	13
4	Rendahnya kualitas dan efektivitas kebijakan publik	RSO-4	4	3	2	2	3	2	3	3	3	2	3,0	2,4	3	2	11
III	Risiko Operasional OPD																
1	Risiko kesalahan dalam perumusan tujuan, metodologi, atau pemilihan topik.	RSOO.18.01	1	4	2	5	1	5	2	5	1	4	1,4	4,6	1	5	9
2	Risiko kegagalan eksperimen, keterlambatan jadwal, atau kualitas data yang rendah.	RSOO.18.02	1	3	2	3	2	2	2	3	1	3	1,6	2,8	2	3	10
3	Risiko ketidaksesuaian prototipe dengan kebutuhan pengguna, masalah teknis, atau biaya produksi tinggi.	RSOO.18.03	3	2	2	1	3	2	3	3	2	1	2,6	1,8	3	2	11
4	Risiko penolakan pasar, regulasi yang tidak mendukung, atau kurangnya mitra industri.	RSOO.18.04	4	2	4	2	3	2	4	2	3	3	3,6	2,2	4	2	12

* diisi berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak dan kemungkinan yan diberikan peserta diskusi

Dari hasil analisis terlihat bahwa skor nilai skala risiko tertinggi pada Bappeda Kota Banda Aceh terdapat pada label berwarna orange yaitu *Rendahnya Indeks Inovasi Daerah (IID)(RSO.2)* yang menjadi risiko prioritas Bappeda di tahun 2026. Adapun nilai skala risiko sedang terdapat pada label berwarna kuning sebanyak 4 (empat) risiko yaitu 1 (satu) pada Risiko Strategis Pemko adalah *Rendahnya predikat SAKIP* dan sebanyak 2 (dua) pada Risiko Strategis OPD adalah *Rendahnya Predikat SAKIP* dan *Rendahnya nilai SAKIP pada komponen perencanaan* serta sebanyak 1 (satu) pada Risiko Operasional OPD adalah *Risiko penolakan pasar, regulasi yang tidak mendukung, atau kurangnya mitra industri*. Daftar Risiko Prioritas Bappeda tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.3.3. Daftar Risiko Prioritas Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2026

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemko					
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSP - 01	15	Walikota	Perencanaan kinerja tidak selaras Indikator tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) Pengukuran dan pelaporan kinerja lemah Monitoring dan evaluasi (Monev) tidak berjalan efektif	Menurunnya kepercayaan publik Citra instansi buruk di mata pemerintah pusat/daerah Evaluasi reformasi birokrasi ikut terdampak Potensi pengurangan alokasi anggaran/kinerja tidak optimal Kinerja organisasi tidak efektif dan tidak efisien Tidak tercapainya sasaran strategis instansi
II	Risiko Strategis OPD					

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSO-1	15	Kepala Bappeda	- Perencanaan kinerja tidak selaras - Indikator tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) - Pengukuran dan pelaporan kinerja lemah - Monitoring dan evaluasi (Monev) tidak berjalan efektif	Menurunnya kepercayaan publik Citra instansi buruk di mata pemerintah pusat/daerah Evaluasi reformasi birokrasi ikut terdampak Potensi pengurangan alokasi anggaran/kinerja tidak optimal Kinerja organisasi tidak efektif dan tidak efisien Tidak tercapainya sasaran strategis instansi
2	Rendahnya Indeks Inovasi Daerah (IID)	RSO-2	19	Kepala Bappeda	Keterbatasan anggaran riset dan inovasi SDM aparatur kurang kompeten, Kurangnya kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, Pelaporan inovasi tidak terdokumentasi dengan baik	Kualitas pelayanan publik tidak berkembang Daya saing daerah menurun Peluang investasi berkurang Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun

N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
3	Rendahnya nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	RSO-3	13	Kepala Bappeda	Kurangnya pemahaman penyusunan SAKIP berbasis hasil (result oriented). Tidak dilakukan reviu berkala terhadap dokumen perencanaan. Minimnya koordinasi antar bidang/unit kerja. Data dukung perencanaan tidak valid atau tidak mutakhir. Perubahan regulasi tidak segera diikuti penyesuaian dokumen.	Nilai evaluasi SAKIP rendah dari KemenPAN-RB/Inspektorat. Turunnya kepercayaan publik terhadap instansi. Perencanaan anggaran tidak efektif dan tidak efisien. Program tidak tepat sasaran. Potensi pengurangan insentif kinerja/DAK/Reward reformasi birokrasi. Sulit mengukur capaian kinerja organisasi secara akurat
II I	Risiko Operasional OPD					
	Risiko penolakan pasar, regulasi yang tidak mendukung, atau kurangnya mitra industri.	RSOO.18.04	12	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Kurangnya strategi pemasaran, regulasi ketat, atau rendahnya minat investor.	Inovasi tidak diterima pasar, kerugian finansial, hilangnya peluang kerja sama.

3.4. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Risiko prioritas yang teridentifikasi sebagai risiko dengan dampak terbesar bagi organisasi membutuhkan rencana tindak pengendalian yang terarah. Rencana tindak disusun dengan memperhatikan uraian pengendalian yang telah dilakukan sebelumnya, celah pengendalian yang ada, serta dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada pada Bappeda Kota Banda Aceh. Selain itu perlu pula ditetapkan target waktu penyelesaian agar seluruh risiko dapat terkendali dengan baik dan tepat waktu. Penilaian atas Kegiatan

Pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan pada Bappeda Kota Banda Aceh pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.1. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
VI	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Tidak adanya anggaran untuk pengembangan SDM	- Pelatihan internal berbasis knowledge sharing - Pemanfaatan teknologi	Bappeda	Triwulan IV	November

Dari risiko prioritas pada Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2026, karena tidak adanya anggaran untuk pengembangan SDM maka bentuk rencana tindak pengendalian yang bisa dilakukan adalah Pelatihan internal berbasis knowledge sharing dan dengan Pemanfaatan teknologi, rencana tindak tersebut direncanakan dilaksanakan pada bulan November triwulan ke empat.

3.5. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi dalam RTP adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Agar rencana tindak yang dibangun dapat terlaksana secara optimal, dibutuhkan media dan sarana komunikasi yang tepat untuk mencapai target sasaran atau penerima informasi. Seperti halnya analisis risiko, penentuan media dan sarana komunikasi rencana tindak pengendalian disusun berdasarkan hasil FGD dengan seluruh pejabat struktural di Bappeda Kota Banda Aceh. Rencana dan Realisasi Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang dibangun Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.1. Rencana dan Realisasi Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

N o	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemko						
1	Kolaborasi multipihak (akademisi, dunia usaha, komunitas)	Rapat koordinasi, Surat-menyerat	Walikota	OPD, Masyarakat	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
II	Risiko Strategis OPD						
1	Kolaborasi multipihak (akademisi, dunia usaha, komunitas)	Rapat koordinasi, Surat-menyerat	Bappeda	OPD, Masyarakat	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
2	Komunikasi publik hasil inovasi	Pelatihan, Rapat koordinasi, Surat-menyerat	Bappeda	OPD, Masyarakat	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
3	Monitoring & evaluasi berkala	Rapat koordinasi, Surat-menyerat	Bappeda	OPD, Masyarakat	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
II I	Risiko Operasional OPD						
1	Melakukan survei kebutuhan dan preferensi masyarakat sebelum produk/kebijakan diluncurkan	Rapat koordinasi, Surat-menyerat, teknologi komunikasi dan internet	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	OPD, Masyarakat	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

Secara umum, bentuk media dan sarana pengkomunikasian rencana tindak pengendalian pada Bappeda Kota Banda Aceh diantaranya adalah berbentuk rapat koordinasi, surat menyurat serta dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan internet. Sebagai instansi yang mengelola kegiatan perencanaan kota, maka target sasaran atau penerima informasi yang dilaksanakan tersebut adalah masyarakat dan OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

3.6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Langkah terakhir yang dilakukan dalam pengendalian risiko organisasi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Adapun proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Adapun pemantauan yang disampaikan dalam dokumen ini adalah berupa pemantauan berkelanjutan yang secara detail berisikan metode pemantauan yang dilakukan bagi setiap rencana tindak pengendalian, penanggung jawab pemantauan, serta waktu pelaksanaannya. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana direncanakan. Dokumentasi dan notulensi rapat, laporan progres;

2. Evaluasi Terpisah

Pemantauan lainnya adalah berupa evaluasi terpisah yang dilakukan oleh Inspektorat. Inspektorat Kota Banda Aceh melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut pemantauan dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP. Bappeda Kota Banda Aceh wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil rekomendasi dari auditor eksternal maupun internal yang telah melakukan audit/evaluasi/reviu.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim dilaporkan secara langsung kepada Walikota Banda Aceh.

Bentuk/metode pemantauan atas pengendalian intern pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2026, beserta rencana dan waktu realisasi pelaksanaan pemantauan dapat dilihat dalam tabel 3.6.1 sebagai berikut.

Tabel 3.6.1. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

N o	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Meto de Pemantauan yang Diperlukan	Penanggun g Jawab Pemantaua n	Rencan a Waktu Pelaksa naan Pemant auan	Realisasi Waktu Pelaksanaa n	Keteranga n
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemko					
1	Kolaborasi multipihak (akademisi, dunia usaha, komunitas)	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Walikota	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanak an sesuai prosedur dan jadwal
II	Risiko Strategis OPD					
1	Kolaborasi multipihak (akademisi, dunia usaha, komunitas)	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Bappeda	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanak an sesuai prosedur dan jadwal
2	Komunikasi publik hasil inovasi	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Bappeda	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanak an sesuai prosedur dan jadwal
3	Monitoring & evaluasi berkala	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Bappeda	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanak an sesuai prosedur dan jadwal
II I	Risiko Operasional OPD					
1	Melakukan survei kebutuhan dan preferensi masyarakat sebelum produk/kebijakan diluncurkan	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendali an Program dan Evaluasi	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanak an sesuai prosedur dan jadwal

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun 2026 merupakan uraian tentang upaya Bappeda untuk mengatasi seluruh ancaman dan risiko yang mengganggu Bappeda dalam mencapai seluruh tujuan dan sasaran organisasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis seluruh risiko pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana tindak pengendalian, identifikasi media/sarana informasi dan komunikasi, serta metode pemantauan yang diperlukan.

Dari analisis risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2026, teridentifikasi risiko tertinggi pada Bappeda Kota Banda Aceh yaitu *Rendahnya Indeks Inovasi Daerah (IID)*. Adapun nilai skala risiko sedang sebanyak 4 (empat) risiko yaitu 1 (satu) pada Risiko Strategis Pemko adalah *Rendahnya predikat SAKIP* dan sebanyak 2 (dua) pada Risiko Strategis OPD adalah *Rendahnya Predikat SAKIP dan Rendahnya nilai SAKIP pada komponen perencanaan* serta sebanyak 1 (satu) pada Risiko Operasional OPD adalah *Risiko penolakan pasar, regulasi yang tidak mendukung, atau kurangnya mitra industri*.

Untuk mengantisipasi risiko strategis tersebut telah disusun rencana tindak pengendalian intern beserta seluruh media/sarana pengkomunikasian dan metode pemantauan yang dibutuhkan. Dengan tersusunnya dokumen RTP Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2026 diharapkan seluruh risiko strategis khususnya yang terkait dengan perencanaan kota dapat dikendalikan dengan baik.

L A M P I R A N

Form 1.a
 REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
 CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BANDA ACEH

Tahun Penilaian : 2026

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	2	4	4	3	4	4	MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	4	4	3	4	3	MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	2	3	4	3	4	3	3	MEMADAI
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	4	3	4	4	4	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	3	4	4	4	4	4	MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	4	3	3	3	3	MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	4	3	4	3	MEMADAI
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	4	3	4	4	4	MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	2	3	4	4	4	4	4	MEMADAI
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (<i>cascading</i>)	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	4	4	3	4	3	MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	4	4	4	4	4	MEMADAI
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	4	4	4	3	4	4	MEMADAI
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	4	4	4	4	3	4	MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	3	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	4	3	4	3	3	MEMADAI
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	4	3	3	2	3	MEMADAI
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara	3	3	4	3	3	2	3	MEMADAI

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
	tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	4	3	3	4	3	MEMADAI
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								KURANG MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	4	4	4	2	4	MEMADAI
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	4	3	3	2	3	MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	4	3	3	3	3	MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	4	3	3	2	3	MEMADAI
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	2	4	3	3	3	3	MEMADAI
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	4	4	3	2	3	MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk Pengembangan SDM	2	2	3	2	1	1	2	KURANG MEMADAI
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								MEMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	4	3	3	3	3	MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	4	4	3	3	3	3	MEMADAI
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	4	3	3	2	3	3	MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	4	3	3	2	3	MEMADAI
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	4	4	4	3	3	MEMADAI

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	4	4	4	4	MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	4	4	4	4	4	MEMADAI

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

M. NURDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196804201990111001

Form 1.b
KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2026

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	DPA	Tidak adanya anggaran untuk pengembangan SDM	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP60 Tahun 2008

Banda Aceh, Januari 2026
Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


M. NURDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196804201990111001

Form 1.c
SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No.	Sub unsur/klasifikasi	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	MEMADAI		Memadai		Memadai	
2	Komitmen terhadap kompetensi	MEMADAI		Memadai		Memadai	
3	Kepemimpinan yang kondusif	MEMADAI		Memadai		Memadai	
4	Pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan	MEMADAI		Memadai		Memadai	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	MEMADAI		Memadai		Memadai	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	KURANG MEMADAI	-	Kurang Memadai	Tidak adanya anggaran untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Tidak adanya anggaran untuk pengembangan SDM
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	MEMADAI		Memadai		Memadai	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	MEMADAI		Memadai		Memadai	

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

M. NURDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196804201990111001

Form 2.a

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: 2026
Sumber Data	: RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2059
Visi	: Banda Aceh Kota Kolaborasi
Misi Strategis RPJM	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Inovatif dan Responsif 3. Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah 4. Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota 5. Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya 6. Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga 7. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Inovatif dan Responsif
Tujuan Strategis RPJM	1. Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul 2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel 3. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota 4. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dan Masyarakat 5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel

Sasaran RPJM	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata 2. Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas dan Daya Saing Generasi Muda 3. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif 4. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektoral Berbasis Keunggulan Daerah 5. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat 6. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas 7. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama dalam Masyarakat 8. Meningkatnya Pelaksanaan Syariat Islam pada Aspek Akidah, Syariah dan Akhlak 9. Meningkatnya Pengembangan serta Pelestarian Seni, Budaya dan Adat Istiadat sesuai dengan Nilai-Nilai Agama 10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 11. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	3. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif
IKU Sasaran RPJM	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4. Indeks Pembangunan Syariah (IPS) 5. Indeks Kemiskinan 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Pengadaan Peta Geospasial Kota Banda Aceh (Swakelola) 2. Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Percepatan Pencapaian Sanitasi Aman Kota Banda Aceh 3. Sosialisasi Percepatan Pencapaian Sanitasi Aman Kota Banda Aceh 4. Perencanaan Penataan Kawasan Sp 5 (Swakelola) 5. Sayembara Transformasi Banda Aceh (Foto, Video, Karya Tulis) (Swakelola) 6. Memperkuat analisa pasar dan meningkatkan produk UMKM 7. Memperkuat analisa pasar dan meningkatkan promosi wisata
Urusan Pemerintahan Daerah	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Penelitian dan Pengembangan
Nama Dinas Terkait	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif IKU: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PROGRAM: 1. Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penelitian dan Pengembangan Daerah
--	--

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


M. NURDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196804201990111001

Form 2.b

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh	
Tahun Penilaian	: 2026	
Periode yang dinilai	: 2026	
Urusan Pemerintahan	: 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Penelitian dan Pengembangan	
OPD yang Dinilai	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	
Sumber Data	: RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2025-2029	
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Perencanaan Daerah	
Sasaran Strategis Renstra	: Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan interaktif Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah	
IKU		TARGET
IKU Renstra OPD	1. Predikat SAKIP 2. Indeks Inovasi Daerah 3. SAKIP Komponen Perencanaan 4. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	100% 100% 100% 100%
Program	1. Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif IKU : 1. Predikat SAKIP 2. Indeks Inovasi Daerah 3. SAKIP Komponen Perencanaan 4. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti PROGRAM : 1. Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penelitian dan Pengembangan Daerah
---	---

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


M. NURDIN, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196804201990111001

Form 2.c

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

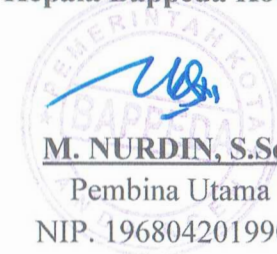
Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: 2026
Urusan Pemerintahan	: 1 Urusan Perencanaan 2 Urusan Penelitian dan Pengembangan
OPD yang Dinilai	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Sumber Data	: RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2025-2029
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Perencanaan Daerah
Program dan Kegiatan Utama	Program : 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kegiatan: 1.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

	2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3.3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan	Sub Kegiatan: 1.1.1 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 1.1.2 Pelaksanaan Konsultasi Publik 1.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1.1.4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota 1.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1.3.1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.4.1 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah 2.1.1 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2.2.1 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2.2.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 2.3.1 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 2.3.2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 3.1.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial

Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Sub Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	3.2.1	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
	3.3.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
	Program :	
	1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	Kegiatan:	
	1.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	Sub Kegiatan	
	1.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


M. NURDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196804201990111001

Form 3.a
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMKO KOTA BANDA ACEH

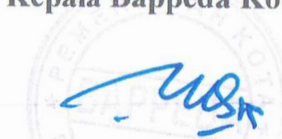
Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Tahun Penilaian : 2026
Periode yang dinilai : RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029
Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis Pemda Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel									
	Sasaran Strategis Pemda									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	Predikat SAKIP	Rendahnya predikat SAKIP	RSP.01	Walikota	"- Perencanaan kinerja tidak selaras - Indikator tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) - Pengukuran dan pelaporan kinerja lemah - Monitoring dan evaluasi (Monev) tidak berjalan efektif"	Internal/eksternal	C	"-Menurunnya kepercayaan publik - Citra instansi buruk di mata pemerintah pusat/daerah - Evaluasi reformasi birokrasi ikut terdampak - Potensi pengurangan alokasi anggaran/kinerja tidak optimal - kinerja organisasi tidak efektif dan tidak efisien - tidak tercapainya sasaran strategis instansi"	Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


M. NURDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196804201990111001

Form 3.b

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
 Tahun Penilaian : 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	k
1	Tujuan Strategis OPD Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Dearah Serta Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Perencanaan Daerah										
1.1	Sasaran Strategis OPD - Meningkatkan perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan interaktif - Meningkatkan peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah	Predikat SAKIP	100 %	Rendahnya predikat SAKIP	RSO-1	Kepala Bappeda	- Perencanaan kinerja tidak selaras - Indikator tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)	Internal/ Eksternal	C	"- Menurunnya kepercayaan publik - Citra instansi buruk di mata pemerintah pusat/daerah - Evaluasi reformasi birokrasi ikut terdampak	Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
				Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	k
							- Pengukuran dan pelaporan kinerja lemah - Monitoring dan evaluasi (Monev) tidak berjalan efektif			- Potensi pengurangan alokasi anggaran/kinerja tidak optimal - Kinerja organisasi tidak efektif dan tidak efisien - Tidak tercapainya sasaran strategis instansi	
		Indeks Inovasi Daerah	100 %	Rendahnya Indeks Inovasi Daerah (IID)	RSO-2	Kepala Bappedda	- Keterbatasan anggaran riset dan inovasi - SDM aparatur kurang kompeten, - Kurangnya kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat	Internal/ Eksternal	C	- Kualitas pelayanan publik tidak berkembang - Daya saing daerah menurun - Peluang investasi berkurang	Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
				Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	k
							- Pelaporan inovasi tidak terdokumentasi dengan baik			- Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun	
		SAKIP Komponen Perencanaan	100 %	Rendahnya nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	RSO-3	Kepala Bappeda	- Kurangnya pemahaman penyusunan SAKIP berbasis hasil (result oriented). - Tidak dilakukan reviu berkala terhadap dokumen perencanaan. - Minimnya koordinasi antar bidang/unit kerja - Data dukung perencanaan tidak valid atau tidak mutakhir.	Internal/ Eksternal	C		Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	k
							- Perubahan regulasi tidak segera diikuti penyesuaian dokumen.				
		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	100 %	Rendahnya kualitas dan efektivitas kebijakan publik	RSO-4	Kepala Bapedda	- Data tidak valid dan tidak terintegrasi - Kapasitas analisis kebijakan belum memadai - Tidak adanya SOP penyusunan kebijakan berbasis bukti	Internal/ Eksternal	C	- Kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran - Inefisiensi anggaran - Menurunnya kepercayaan publik	Pemerintah Kota Banda Aceh dan Masyarakat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Risiko			Sebab		C/ UC	Dampak	
				Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	k
							- Keterbatasan anggaran kajian				

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



M. NURDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196804201990111001

Form 3.c

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
 Tahun Penilaian : 2026

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Target Kinerja	Uraian Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d		e	f	g	h	i	j	k	k
1	Pengembangan inovasi dan Teknologi											
	Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Perencanaan	Risiko kesalahan dalam perumusan tujuan, metodologi, atau pemilihan topik.	RSOO.1 8.01	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Kurangnya studi literatur, keterbatasan sumber daya manusia, atau asumsi yang tidak valid.	Internal/ Eksternal	C	Penelitian tidak fokus, pemborosan waktu dan biaya.	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda/ Masyarakat
				Pelaksanaan/ pengembangan	Risiko kegagalan eksperimen, keterlambatan jadwal, atau kualitas data yang rendah.	RSOO.1 8.02	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Risiko kegagalan eksperimen, keterlambatan jadwal, atau kualitas data yang rendah.	Internal/ Eksternal	C	Hasil penelitian tidak valid, keterlambatan output, reputasi peneliti menurun.	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda/ Masyarakat

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Target Kinerja	Uraian Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d		e	f	g	h	i	j	k	k
				Implementasi teknologi	Risiko ketidaksesuaian prototipe dengan kebutuhan pengguna, masalah teknis, atau biaya produksi tinggi.	RSOO.1 8.03	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Desain tidak matang, minim uji coba, atau keterbatasan dana.	Internal/ Eksternal	C	Produk gagal diproduksi, tidak layak digunakan, atau tidak efisien.	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda/ Masyarakat
				Diseminasi dan komersialisasi hasil inovasi	Risiko penolakan pasar, regulasi yang tidak mendukung, atau kurangnya mitra industri.	RSOO.1 8.04	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Kurangnya strategi pemasaran, regulasi ketat, atau rendahnya minat investor.	Internal/ Eksternal	C	Inovasi tidak diterima pasar, kerugian finansial, hilangnya peluang kerja sama.	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda/ Masyarakat

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

M. NURDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama muda

NIP. 196804201990111001

Form 4
ANALISIS RESIKO BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	R1		R2		R3		R4		R5		Hasil Rata Rata		Analisis Risiko (Pembulatan)		Skala Risiko
			D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	
I	Risiko Strategis Pemko																
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSP - 01	2	5	2	4	2	4	3	5	2	5	2,2	4,6	2	5	15
II	Risiko Strategis OPD																
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSO-1	2	5	3	5	2	5	2	5	2	4	2,2	4,8	2	5	15
2	Rendahnya Indeks Inovasi Daerah (IID)	RSO-2	5	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3,8	3,6	4	4	19
3	Rendahnya nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	RSO-3	3	2	4	2	4	2	4	3	4	3	3,8	2,4	4	2	13
4	Rendahnya kualitas dan efektivitas kebijakan publik	RSO-4	4	3	2	2	3	2	3	3	3	2	3,0	2,4	3	2	11

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	R1		R2		R3		R4		R5		Hasil Rata Rata		Analisis Risiko (Pembulatan)		Skala Risiko
			D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	
III	Risiko Operasional OPD																
1	Risiko kesalahan dalam perumusan tujuan, metodologi, atau pemilihan topik.	RSOO.18.01	1	4	2	5	1	5	2	5	1	4	1,4	4,6	1	5	9
2	Risiko kegagalan eksperimen, keterlambatan jadwal, atau kualitas data yang rendah.	RSOO.18.02	1	3	2	3	2	2	2	3	1	3	1,6	2,8	2	3	10
3	Risiko ketidaksesuaian prototipe dengan kebutuhan pengguna, masalah teknis, atau biaya produksi tinggi.	RSOO.18.03	3	2	2	1	3	2	3	3	2	1	2,6	1,8	3	2	11
4	Risiko penolakan pasar, regulasi yang tidak mendukung, atau kurangnya mitra industri.	RSOO.18.04	4	2	4	2	3	2	4	2	3	3	3,6	2,2	4	2	12

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

**M. NURDIN, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196804201990111001

Form 5
KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang selaras dan aplikatif
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemko					
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSP - 01	15	Walikota	- Perencanaan kinerja tidak selaras - Indikator tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) - Pengukuran dan pelaporan kinerja lemah - Monitoring dan evaluasi (Monev) tidak berjalan efektif	-Menurunnya kepercayaan publik - Citra instansi buruk di mata pemerintah pusat/daerah - Evaluasi reformasi birokrasi ikut terdampak - Potensi pengurangan alokasi anggaran/kinerja tidak optimal - kinerja organisasi tidak efektif dan tidak efisien - tidak tercapainya sasaran strategis instansi

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II	Risiko Strategi OPD					
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSO-1	15	Kepala Bappeda	- Perencanaan kinerja tidak selaras - Indikator tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) - Pengukuran dan pelaporan kinerja lemah - Monitoring dan evaluasi (Monev) tidak berjalan efektif	- Menurunnya kepercayaan publik - Citra instansi buruk di mata pemerintah pusat/daerah - Evaluasi reformasi birokrasi ikut terdampak - Potensi pengurangan alokasi anggaran/kinerja tidak optimal - Kinerja organisasi tidak efektif dan tidak efisien - Tidak tercapainya sasaran strategis instansi
2	Rendahnya Indeks Inovasi Daerah (IID)	RSO-2	19	Kepala Bappeda	- Keterbatasan anggaran riset dan inovasi - SDM aparatur kurang kompeten, - Kurangnya kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat	- Kualitas pelayanan publik tidak berkembang - Daya saing daerah menurun - Peluang investasi berkurang

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
					- Pelaporan inovasi tidak terdokumentasi dengan baik	- Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun
3	Rendahnya nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	RSO-3	13	Kepala Bappeda	- Kurangnya pemahaman penyusunan SAKIP berbasis hasil (result oriented). - Tidak dilakukan reviu berkala terhadap dokumen perencanaan. - Minimnya koordinasi antar bidang/unit kerja. - Data dukung perencanaan tidak valid atau tidak mutakhir. - Perubahan regulasi tidak segera diikuti penyesuaian dokumen.	- Nilai evaluasi SAKIP rendah dari KemenPAN-RB/Inspektorat. - Turunnya kepercayaan publik terhadap instansi. - Perencanaan anggaran tidak efektif dan tidak efisien. - Program tidak tepat sasaran. - Potensi pengurangan insentif kinerja/DAK/Reward reformasi birokrasi. - Sulit mengukur capaian kinerja organisasi secara akurat

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
III	Risiko Operasional OPD					
1	Risiko penolakan pasar, regulasi yang tidak mendukung, atau kurangnya mitra industri.	RSOO.18.04	12	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Kurangnya strategi pemasaran, regulasi ketat, atau rendahnya minat investor.	Inovasi tidak diterima pasar, kerugian finansial, hilangnya peluang kerja sama.

Banda Aceh, Januari 2026
 Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



M. NURDIN, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196804201990111001

Form 6

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN/
RTP ATAS ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN (RTP atas CEE)

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2026

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
VI	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Tidak adanya anggaran untuk pengembangan SDM	- Pelatihan internal berbasis knowledge sharing - Pemanfaatan teknologi	TAPD dan Bappeda	Triwulan IV	November

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh




M. NURDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196804201990111001

Form 7

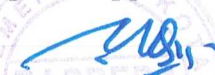
**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Selaras dan Aplikatif
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemko						
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSP - 01	Kolaborasi multipihak (akademisi, dunia usaha, komunitas)	SDM terbatas dalam riset dan teknologi	Kerjasama antar lembaga, kerjasama antar daerah dan pemanfaatan CSR	Walikota	Triwulan I s.d IV
II	Risiko Strategis OPD						
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSO-1	Kolaborasi multipihak (akademisi, dunia usaha, komunitas)	SDM terbatas dalam riset dan teknologi	Kerjasama antar lembaga, kerjasama antar daerah dan pemanfaatan CSR	Kepala Bappeda	Triwulan I s.d IV
2	Rendahnya Indeks Inovasi Daerah (IID)	RSO-2	Komunikasi publik hasil inovasi	Kurang publikasi sehingga inovasi tidak dikenal masyarakat	Optimalisasi website/media sosial OPD/Pemko	Kepala Bappeda	Triwulan I s.d IV
3	Rendahnya nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	RSO-3	Monitoring & evaluasi berkala	Data inovasi tidak terintegrasi antar-OPD	Memastikan semua inovasi telah	Kepala Bappeda	Triwulan I s.d IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
					didokumentasi dengan baik, dan menginput data yang akurat pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) secara rutin untuk meningkatkan skor		
III	Risiko Operasional OPD						
1	Risiko penolakan pasar, regulasi yang tidak mendukung, atau kurangnya mitra industri.	RSOO.18.04	Melakukan survei kebutuhan dan preferensi masyarakat sebelum produk/kebijakan diluncurkan	Minimnya data primer tentang kebutuhan masyarakat	Pemanfaatan Teknologi (membuat survei online dan menggunakan media sosial)	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan I s.d IV

Banda Aceh, Januari 2026
 Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


M. NURDIN, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196804201990111001

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel
 Urusan Pemerintahan : 1. Perencanaan
 2. Penelitian dan pengembangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemko						
1	Kolaborasi multipihak (akademisi, dunia usaha, komunitas)	Rapat koordinasi, Surat-menyurat	Walikota	OPD, Masyarakat	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
II	Risiko Strategis OPD						
1	Kolaborasi multipihak (akademisi, dunia usaha, komunitas)	Rapat koordinasi, Surat-menyurat	Bappeda	OPD, Masyarakat	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
2	Komunikasi publik hasil inovasi	Pelatihan, Rapat koordinasi, Surat-menyurat	Bappeda	OPD, Masyarakat	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
3	Monitoring & evaluasi berkala	Rapat koordinasi, Surat-menyurat	Bappeda	OPD, Masyarakat	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
III	Risiko Operasional OPD						
1	Melakukan survei kebutuhan dan preferensi masyarakat sebelum produk/kebijakan diluncurkan	Rapat koordinasi, Surat-menysurat, teknologi komunikasi dan internet	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	OPD, Masyarakat	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

Banda Aceh, Januari 2026
 Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

M. NURDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196804201990111001

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

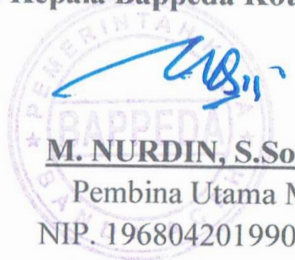
Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2026
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Selaras dan Aplikatif
 Urusan Pemerintahan : Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemko					
1	Kolaborasi multipihak (akademisi, dunia usaha, komunitas)	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Walikota	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
II	Risiko Strategis OPD					
1	Kolaborasi multipihak (akademisi, dunia usaha, komunitas)	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Kepala Bappeda	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
2	Komunikasi publik hasil inovasi	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Kepala Bappeda	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
3	Monitoring & evaluasi berkala	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Kepala Bappeda	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
III	Risiko Operasional OPD					
1	Melakukan survei kebutuhan dan preferensi masyarakat sebelum produk/kebijakan diluncurkan	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Kabid Riset, Inovasi Daerah, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

Banda Aceh, Januari 2026

Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


M. NURDIN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196804201990111001

Form 10
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (*RISK EVENT*) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2026
Tujuan Strategis : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Selaras dan Aplikatif
Urusan Pemerintahan : Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tgl terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemko									
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSP - 01		Perencanaan kinerja tidak selaras Indikator tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) Pengukuran dan pelaporan kinerja lemah	Menurunnya kepercayaan publik Citra instansi buruk di mata pemerintah pusat/daerah Evaluasi reformasi birokrasi ikut terdampak		Kerjasama antar lembaga, kerjasama antar daerah dan pemanfaatan CSR	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

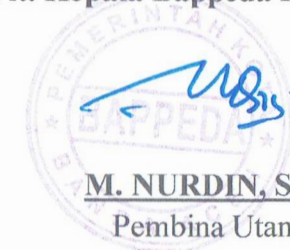
				Monitoring dan evaluasi (Monev) tidak berjalan efektif	Potensi pengurangan alokasi anggaran/kinerja tidak optimal Kinerja organisasi tidak efektif dan tidak efisien Tidak tercapainya sasaran strategis instansi					
II	Risiko Strategis OPD									
1	Rendahnya predikat SAKIP	RSO-1		Perencanaan kinerja tidak selaras Indikator tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) Pengukuran dan pelaporan kinerja lemah	Menurunnya kepercayaan publik Citra instansi buruk di mata pemerintah pusat/daerah Evaluasi reformasi birokrasi ikut terdampak		Kerjasama antar lembaga, kerjasama antar daerah dan pemanfaatan CSR	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

				Monitoring dan evaluasi (Monev) tidak berjalan efektif	Potensi pengurangan alokasi anggaran/kinerja tidak optimal Kinerja organisasi tidak efektif dan tidak efisien Tidak tercapainya sasaran strategis instansi					
2	Rendahnya Indeks Inovasi Daerah (IID)	RSO-2		Keterbatasan anggaran riset dan inovasi SDM aparatur kurang kompeten, Kurangnya kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat Pelaporan inovasi tidak terdokumentasi dengan baik	Kualitas pelayanan publik tidak berkembang Daya saing daerah menurun Peluang investasi berkurang Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menurun		Optimalisasi website/media sosial OPD/Pemko	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

3	Rendahnya nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan	RSO-3	Kurangnya pemahaman penyusunan SAKIP berbasis hasil (result oriented). - Tidak dilakukan reviu berkala terhadap dokumen perencanaan. Minimnya koordinasi antar bidang/unit kerja. Data dukung perencanaan tidak valid atau tidak mutakhir. Perubahan regulasi tidak segera diikuti penyesuaian dokumen.	Nilai evaluasi SAKIP rendah dari KemenPAN-RB/Inspektorat. Turunnya kepercayaan publik terhadap instansi. Perencanaan anggaran tidak efektif dan tidak efisien. Program tidak tepat sasaran. Potensi pengurangan insentif kinerja/DAK/Reward reformasi birokrasi. Sulit mengukur capaian kinerja organisasi secara akurat	Memastikan semua inovasi telah didokumentasi dengan baik, dan menginput data yang akurat pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) secara rutin untuk meningkatkan skor	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
---	---	-------	--	--	--	-------------------	------------------	---

III Risiko Operasional OPD										
1	Risiko penolakan pasar, regulasi yang tidak mendukung, atau kurangnya mitra industri.	RSOO.18.04					Pemanfaatan Teknologi (membuat survei online dan menggunakan media sosial)	Triwulan I s.d IV	Januari-Desember	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

Banda Aceh, Januari 2026


 Plt. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh
 
**M. NURDIN, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196804201990111001